

TANTANGAN DAN STRATEGI DALAM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN BERKUALITAS DENGAN SIPD: STUDI KUALITATIF DI KABUPATEN TOJO UNA-UNA

Nasrun Naida ¹, Dewi Sartika ²

¹PSDKU, Universitas Tadulako, Indonesia

²BPKAD, Pemda Tojo Una-Una, Indonesia
nasrunnaida79@gmail.com

Abstract

This study examines the modernization of regional financial management to enhance transparency, accountability, and efficiency in Tojo Una-Una Regency. By implementing the Regional Government Information System (SIPD) with the Accounting and Reporting (AKLAP) module since 2022, the Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) aims to improve the quality of financial reports in accordance with government accounting standards. However, limitations in human resource (HR) competence and a lack of technical training for operators hinder optimal integration and report accuracy. Using a descriptive qualitative method with an inductive approach, this research identifies barriers and SIPD optimization strategies through interviews and observations. The data collected was analyzed using thematic analysis techniques to identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats related to the implementation of SIPD, which were organized within a SWOT analysis framework. Key findings indicate that limited HR competence and unequal technological infrastructure across Regional Government Organizations (OPD) are the main obstacles. Recommendations include intensive training for SIPD operators and strengthening technology infrastructure at the OPD level, which are expected to enhance regional financial management performance, creating a more transparent, accurate, and accountable system..

Keywords: SIPD; challenges; strategies; financial reports

Abstrak

Penelitian ini mengkaji modernisasi pengelolaan keuangan daerah untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi di Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan mengimplementasikan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) modul Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) sejak 2022, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) bertujuan memperbaiki kualitas laporan keuangan sesuai standar akuntansi pemerintah. Namun, keterbatasan kompetensi SDM dan minimnya pelatihan teknis bagi operator menghambat optimalisasi integrasi dan akurasi laporan. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif, penelitian ini mengidentifikasi hambatan dan strategi optimasi SIPD melalui wawancara dan observasi. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman terkait penerapan SIPD, yang disusun dalam kerangka analisis SWOT. Temuan utama menunjukkan bahwa kompetensi SDM yang rendah serta infrastruktur teknologi yang belum merata di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi kendala utama. Rekomendasi berupa pelatihan intensif operator SIPD dan penguatan infrastruktur teknologi di OPD diharapkan mampu meningkatkan kinerja keuangan daerah secara transparan, akurat, dan akuntabel.

Kata Kunci: SIPD; tantangan; strategi; laporan keuangan

A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun terakhir, modernisasi pengelolaan keuangan daerah telah menjadi prioritas dalam upaya meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola pemerintahan. Salah satu bentuk dari modernisasi tersebut adalah penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), yang dikembangkan untuk memfasilitasi proses penganggaran, penatausahaan, hingga pelaporan keuangan berbasis akrual di seluruh pemerintahan daerah. SIPD dirancang untuk memastikan bahwa pelaporan keuangan daerah dilakukan secara lebih tepat waktu, akurat, dan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah yang berlaku.

Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas menjadi salah satu aspek krusial dalam pengelolaan keuangan daerah. Laporan Keuangan (LK) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010. Laporan ini tidak hanya menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan selama periode tertentu, tetapi juga menjadi alat ukur untuk menilai akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan publik.

Dalam menyusun Laporan Keuangan Pemerintah (LKPD), terdapat karakteristik tertentu yang harus dimiliki agar informasi yang disajikan dapat dianggap akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Karakteristik tersebut meliputi relevansi, keandalan, kemampuan untuk dibandingkan, dan kemudahan pemahaman. Komponen LKPD terdiri dari beberapa elemen penting, seperti Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP SAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Menurut PP No. 12 Tahun 2019, pelaporan keuangan Pemerintah Daerah adalah proses penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan yang merupakan hasil konsolidasi dari laporan keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). LKPD disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir sebagai bahan audit untuk menilai kualitas informasi yang disajikan.

Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tojo Una-Una, SIPD telah diimplementasikan secara menyeluruh, terutama melalui SIPD Akuntansi dan Pelaporan (SIPD Aklap) yang mulai digunakan sejak tahun anggaran 2022. Perubahan fundamental dalam aplikasi ini membawa peningkatan pada kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sesuai penelitian Ardianto & Eforis (2019), penerapan teknologi informasi yang memadai berperan penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan daerah. Hal ini dibuktikan dengan pencapaian Kabupaten Tojo Una-Una yang kembali meraih opini WTP dari BPK untuk Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023, menjadikannya opini WTP ke-12 secara berturut-turut (BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una, 2023).

Opini yang diberikan oleh BPK mencerminkan tingkat akuntabilitas, transparansi, dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah yang tercatat dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD ini sendiri merupakan hasil dari penerapan sistem informasi akuntansi daerah yang handal. Menurut (Defitri, 2014), pelaporan keuangan pemerintah daerah harus mampu menyediakan informasi yang diperlukan oleh berbagai pihak, seperti kondisi keuangan, situasi ekonomi, kepatuhan terhadap regulasi, serta pelaksanaan perencanaan dan penganggaran, ditambah informasi tambahan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Oleh karena itu, kesiapan BPKAD Kabupaten Tojo Una-Una dalam menerapkan SIPD sebagai teknologi informasi pada sistem akuntansi daerah sejak Tahun Anggaran 2022 menjadi topik yang sangat penting untuk diteliti lebih lanjut.

Namun, dalam praktiknya, implementasi SIPD di beberapa daerah, termasuk di Kabupaten Tojo Una-Una, masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan pengamatan penulis sejak tahun 2022, ditemukan bahwa penerapan SIPD di Kabupaten Tojo Una-Una belum berjalan sesuai harapan. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan jumlah staf yang memiliki

kompetensi dalam pengoperasian SIPD, yang berpengaruh langsung terhadap kemampuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk beradaptasi dengan sistem baru ini. Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia (SDM) dalam mengelola SIPD menyebabkan proses penerapan sistem belum optimal di seluruh OPD, yang berdampak pada kualitas laporan keuangan yang disusun. Hal ini sesuai dengan (Binawati et al., 2022) menyatakan bahwa akuntabilitas sangat berkaitan dengan kinerja sumber daya manusia yang terlibat. Kompetensi yang dimiliki setiap SDM menjadi faktor kunci dalam memastikan bahwa pertanggungjawaban dapat diwujudkan secara efektif.

Selain itu, meskipun modul SIPD Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP) dirancang untuk meningkatkan akurasi serta integrasi laporan keuangan, kenyataannya, banyak Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang belum memaksimalkan penggunaannya. Selain itu, pengembang SIPD, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, masih terus melakukan pembaruan dan penyempurnaan yang memerlukan waktu bagi pemerintah daerah untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan dalam modul SIPD AKLAP. Situasi ini tidak hanya menyebabkan ketidaksesuaian dalam pelaporan antar-OPD, tetapi juga mengurangi efektivitas sistem dalam menyajikan laporan keuangan yang akurat dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Tantangan lainnya adalah ketidakseimbangan kompetensi SDM di bidang akuntansi di berbagai OPD, yang berdampak pada pelaksanaan SIPD yang tidak merata. Beberapa OPD tidak memiliki staf yang memiliki latar belakang akuntansi yang kuat, sehingga kesalahan dan ketidakakuratan dalam pengelolaan keuangan sering terjadi. Hal ini menghambat optimalisasi penggunaan SIPD dan menurunkan efektivitas sistem dalam menghasilkan laporan keuangan yang sesuai standar.

Hal tersebut sejalan dengan Wurara *et al* (2020) menemukan bahwa rendahnya kualitas SDM di SKPD menjadi penyebab utama keterlambatan dalam proses input data perencanaan. Selain itu, terbatasnya pelatihan teknis juga berdampak pada kemampuan operator dalam mengoperasikan SIPD, sehingga banyak dari mereka belum dapat menggunakan sistem ini dengan optimal.

Selanjutnya menurut Teken & Romarina (2023), penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) masih belum optimal karena kurangnya sosialisasi dan pelatihan yang memadai bagi para pengguna. Selain itu, keterbatasan keahlian tenaga pendamping serta SDM dalam mengoperasikan sistem ini, ditambah lambatnya respon dari Pemerintah Pusat terhadap masalah yang dihadapi dinas, juga menjadi kendala. Belum sepenuhnya berjalannya sistem pengelolaan keuangan semakin memperlambat efektivitas penerapan SIPD secara keseluruhan.

Hal yang sama menurut Tumija *et al* (2023), menunjukkan bahwa implementasi SIPD dalam pengelolaan keuangan daerah sudah berjalan. Namun, pada aspek sumber daya, terutama dalam hal fasilitas sistem informasi Akuntansi dan Pelaporan (Aklap), meskipun menu yang diperlukan telah tersedia, pengguna masih belum dapat mengaksesnya.

Penerapan SIPD, termasuk modul Akuntansi dan Pelaporan (AKLAP), telah menjadi bagian integral dari pengelolaan keuangan di Kabupaten Tojo Una-Una. Meskipun tantangan masih ada, diharapkan dengan strategi-strategi yang telah dirumuskan, Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan yang disusun, serta mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan.

Di Kabupaten Tojo Una-Una, penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) diharapkan dapat menjadi alat bantu dalam menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Namun, pelaksanaan SIPD masih menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang terampil, integrasi data yang belum optimal, dan kecenderungan beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk tetap menggunakan metode manual dalam penyusunan laporan. Hal ini dapat mempengaruhi akurasi dan keandalan laporan keuangan yang dihasilkan.

Adapun Rumusan masalah penelitian ini adalah Apa tantangan/kendala yang dihadapi dalam penerapan SIPD pada proses pelaporan keuangan? dan bagaimana Strategi mengatasi kendala tersebut?.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan SIPD pada modul Aklap terhadap transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam proses pelaporan keuangan di Pemerintah Kabupaten Tojo Una-Una. Dan mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam penerapan SIPD, termasuk aspek kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) dan infrastruktur teknologi, serta memberikan rekomendasi untuk mengatasi kendala tersebut guna meningkatkan efektivitas sistem.

B. KAJIAN LITERATUR DAN TEORI

1. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah metode komprehensif untuk menilai kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) suatu organisasi, sebagaimana dijelaskan oleh Kotler & Armstrong (2008:64). Dengan kata lain, SWOT membantu mengevaluasi potensi internal seperti kekuatan dan kelemahan serta peluang dan tantangan eksternal yang mungkin dihadapi organisasi (Hartono, 2005:46). David (2006:8) juga menjelaskan bahwa setiap organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan di bidang fungsional yang bisa menjadi landasan dalam merumuskan tujuan dan strategi.

Dalam konteks artikel ini, analisis SWOT diterapkan untuk memahami tantangan dan strategi dalam mewujudkan laporan keuangan berkualitas melalui penerapan SIPD di Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan demikian, pemerintah daerah diharapkan mampu memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada, serta mengurangi kelemahan dan mengatasi ancaman, sehingga tercipta laporan keuangan yang transparan, akuntabel, dan berkualitas.

2. Sistem Informasi Akuntansi

Menurut Romney & Steinbart (2018) mendefinisikan sistem informasi akuntansi sebagai sebuah sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, dan mengolah data sehingga menghasilkan informasi yang dibutuhkan oleh para pengambil keputusan. Sistem ini terdiri dari enam elemen utama, yaitu: individu yang mengelola sistem, prosedur dan instruksi untuk pengumpulan dan pemrosesan data, data yang terkait dengan proses bisnis, perangkat lunak untuk mengolah data, infrastruktur teknologi informasi yang mendukung, serta mekanisme pengendalian internal dan keamanan untuk menjaga integritas sistem..

Di sisi lain, Turner & Weickgenannt (2009) mendeskripsikan sistem informasi akuntansi sebagai kumpulan proses, prosedur, dan sistem yang menangkap data akuntansi dari aktivitas bisnis, mencatatnya dalam catatan yang sesuai, serta mengolahnya melalui klasifikasi, peringkasan, dan konsolidasi untuk dilaporkan kepada pengguna internal maupun eksternal. Arif & Firmansyah (2024) menambahkan bahwa sistem ini melibatkan elemen-elemen seperti manusia, prosedur, data, perangkat lunak, infrastruktur TI, dan pengendalian internal yang berfungsi untuk mengolah data menjadi informasi bermanfaat bagi pengambil keputusan.

3. Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005, Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) adalah sistem yang berfungsi untuk mendokumentasikan, mengelola, dan mengolah data mengenai pengelolaan keuangan daerah serta data terkait lainnya. Hasil pengolahan data ini kemudian disajikan kepada masyarakat dan digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan pertanggungjawaban oleh pemerintah daerah.

Sementara Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) adalah bagian dari Sistem SIKD yang khusus berfokus pada pengelolaan keuangan daerah dengan tujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi. SIPD berfungsi sebagai perangkat lunak yang mendukung berbagai aspek keuangan, mulai dari proses anggaran, realisasi, monitoring belanja, hingga pelaporan keuangan daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 70 Tahun 2019, SIPD meliputi dua informasi utama: pertama, Informasi Pembangunan Daerah yang mengelola data perencanaan dan analisis pembangunan, dan kedua, Informasi Keuangan Daerah yang mencakup perencanaan anggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, serta laporan pertanggungjawaban keuangan yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD).

Salah satu fungsi SIPD adalah menyediakan Informasi Laporan Keuangan yang akses melalui SIPD Akuntansi dan Laporan (SIPD Aklap). Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Pasal 214 ayat (2) menyatakan Informasi keuangan daerah paling sedikit memuat informasi penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan.

4. Kualitas Laporan Keuangan

Kualitas laporan keuangan merujuk pada penyajian laporan yang memenuhi beberapa kriteria utama, seperti kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), kelengkapan pengungkapan informasi, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta efektivitas pengendalian internal yang diterapkan (Yuliani, 2010). Laporan keuangan dianggap berkualitas baik jika informasi di dalamnya mudah dipahami, relevan dengan kebutuhan pengguna untuk proses pengambilan keputusan, bebas dari kesalahan yang dapat menimbulkan kesalahpahaman, dan tanpa kesalahan material. Selain itu, informasi dalam laporan keuangan harus dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya untuk memberikan gambaran yang konsisten (Marpaung, 2018).

Selanjutnya menurut Mardiasmo (2009), meskipun Laporan Keuangan bukan satu-satunya referensi dalam pengambilan keputusan, informasi finansial yang disajikannya memiliki pengaruh besar terhadap kualitas keputusan tersebut. Lebih dari sekadar data angka, Laporan Keuangan juga menjadi wujud tanggung jawab pemerintah dalam menunjukkan kinerja keuangan kepada publik, seperti yang disampaikan oleh Hopwood (2014). Pemerintah berkewajiban menyajikan informasi keuangan yang jujur dan transparan, agar masyarakat dapat mempercayai pengelolaan keuangan publik dan memastikan adanya transparansi serta akuntabilitas di dalamnya.

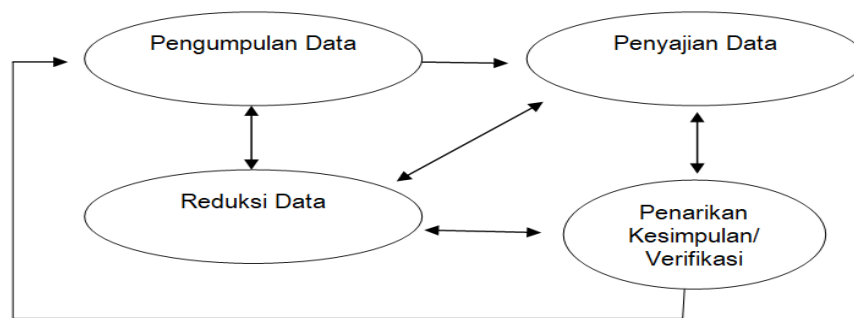
Dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 menjelaskan bahwa agar Laporan Keuangan akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, harus (Marpaung, 2018) s memenuhi beberapa karakteristik: relevan (mampu mempengaruhi keputusan pengguna dengan memberikan evaluasi dan prediksi), andal (bebas dari kesalahan, jujur, dan dapat diverifikasi), dapat dibandingkan (berguna jika dibandingkan dengan laporan periode lain atau entitas lain), dan mudah dipahami (disajikan dalam bentuk serta istilah yang sesuai dengan pemahaman pengguna)..

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif, yang berfungsi untuk menggali informasi secara mendalam dan faktual. Metode ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan, namun juga untuk melakukan perbandingan dan evaluasi, serta memahami bagaimana pihak lain menghadapi tantangan serupa. Dengan memetik pelajaran dari pengalaman mereka, diharapkan penelitian ini dapat membantu merumuskan rencana dan keputusan yang lebih tepat di masa mendatang (Suyanto & Sutinah, 2006). Pendekatan ini dipilih demi memperoleh wawasan mendalam tentang tantangan serta strategi dalam penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una, sehingga memberikan pandangan komprehensif bagi pengelolaan yang lebih efektif.

Subjek penelitian meliputi 4 pejabat dan 3 staf yang terlibat langsung dalam penggunaan dan memiliki pemahaman dan pengalaman yang memadai tentang SIPD, dipilih secara purposive yaitu Kepala BPKAD sekalu BUD dan Penguna Anggaran, Kepala Bidang Perbendaharaan, Kepala Bidang Akuntansi, Kepala Sub Bidang Pelaporan, Kepala Sub Bidang Anggaran, Staf bidang akuntansi, bendahara Pengeluaran dan Penerimaan BPKAD. Data dikumpulkan melalui wawancara semi-terstruktur untuk mengeksplorasi pengalaman, tantangan, dan strategi dalam penggunaan SIPD; observasi langsung guna memahami proses kerja serta mengidentifikasi kendala tersembunyi; dan dokumentasi yang meliputi laporan keuangan pemerintah daerah, regulasi Keuangan Daerah dan SIPD, dan opini BPK sebagai data sekunder untuk mendukung analisis.

Analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis kualitatif interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992). Data yang diperoleh akan dianalisis secara tematik, melalui tahap pengumpulan, reduksi, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, serta penarikan kesimpulan untuk menjawab tantangan dan strategi dalam penerapan SIPD. Untuk memastikan validitas data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, dengan membandingkan hasil dari wawancara, observasi, dan dokumentasi serta melakukan konsultasi dengan ahli akuntansi pemerintah dan keuangan daerah.



Gambar 1. Model Interaktif Analisis Data

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Pemerintah Daerah Kabupaten Tojo Una-Una telah membawa perubahan signifikan dalam penyajian laporan keuangan yang berkualitas. Laporan keuangan yang dihasilkan memiliki karakteristik yang sangat penting seperti relevan, andal, dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Dengan demikian, SIPD mampu menyajikan informasi yang tidak hanya mudah dipahami, tetapi juga sangat bermanfaat bagi penggunanya, khususnya dalam mendukung proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, penelitian ini akan mengulas lebih mendalam mengenai analisis SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman) terkait penerapan SIPD, yang diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih jelas tentang tantangan dan strategi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Berkualitas dengan SIPD.

Analisis Kekuatan (*Strengths*)

Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) memberikan berbagai keunggulan dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas di tingkat pemerintah daerah. Berdasarkan hasil penelitian, SIPD terbukti mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Dengan bantuan SIPD melalui modul AKLAP, proses penyusunan laporan keuangan berbasis akrual menjadi lebih cepat dan akurat, mengurangi risiko kesalahan pencatatan yang

sering terjadi. Selain itu, SIPD memungkinkan integrasi data lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga koordinasi dan administrasi berjalan lebih efisien. Fitur *real-time* yang dihadirkan oleh SIPD memungkinkan pimpinan daerah membuat keputusan berbasis data yang lebih akurat dan responsif. Berdasarkan informan BPKAD, juga menyebutkan bahwa SIPD meningkatkan kontrol atas anggaran, yang pada akhirnya mendorong efektivitas dalam pengelolaan dan penggunaan dana daerah secara keseluruhan.

Hal ini selaras dengan temuan Naida *et al* (2023), yang mengungkapkan bahwa SIPD memiliki dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah. SIPD mampu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan, serta mempermudah proses penyusunan laporan berbasis akrual dengan lebih cepat dan akurat. Hal ini mengurangi risiko kesalahan pencatatan yang sering terjadi dalam sistem manual.

Analisis Kelemahan (*Weaknesses*)

Walaupun SIPD memberikan berbagai manfaat dalam pengelolaan keuangan daerah, penelitian ini mengungkap beberapa kendala yang menghambat penerapannya secara maksimal. Salah satu tantangan utama adalah belum meratanya kompetensi sumber daya manusia (SDM) di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Banyak pegawai masih belum terbiasa dengan teknologi informasi, dan pelatihan yang disediakan sejauh ini masih belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan operasional SIPD di setiap OPD. Akibatnya, sejumlah staf mengalami kesulitan, khususnya dalam mengoperasikan modul akuntansi dan pelaporan yang memerlukan pemahaman teknis yang lebih mendalam. Selain itu, tantangan lain datang dari keterbatasan infrastruktur teknologi, terutama koneksi internet yang seringkali tidak stabil di beberapa wilayah. Kurangnya dukungan infrastruktur ini memperlambat proses penyusunan laporan keuangan, membuat sistem tidak berjalan seefisien yang diharapkan. Hambatan-hambatan ini menunjukkan pentingnya peningkatan pelatihan SDM dan perbaikan infrastruktur guna memastikan SIPD dapat digunakan secara efektif di seluruh daerah.

Hal ini sejalan dengan temuan Wurara *et al* (2020) yang menunjukkan bahwa rendahnya kualitas SDM di SKPD menjadi faktor utama keterlambatan dalam proses input data perencanaan. Keterbatasan pelatihan teknis juga menjadi masalah besar, mengingat banyak operator yang belum mampu mengoperasikan SIPD secara optimal. Hal ini menggarisbawahi kelemahan utama dalam penerapan SIPD di Kabupaten Tojo Una-Una, yaitu kurangnya kompetensi SDM yang merata di seluruh OPD. Meskipun SIPD menawarkan berbagai keuntungan, jika SDM tidak dilengkapi dengan keterampilan yang memadai dan pelatihan yang cukup, maka implementasi sistem ini akan terhambat, memperlambat proses administrasi, dan menurunkan efisiensi dalam penyusunan laporan keuangan.

Analisis Peluang (*Opportunities*)

Penerapan SIPD di Kabupaten Tojo Una-Una menghadirkan peluang besar untuk terus ditingkatkan, terutama dengan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Berbagai kebijakan dan program penguatan kapasitas teknis yang secara berkala diadakan oleh pemerintah pusat memberikan landasan kuat bagi daerah untuk mengoptimalkan SIPD. Pembaruan sistem yang konsisten serta pelatihan teknis secara berkala memungkinkan daerah untuk mengikuti perkembangan teknologi dengan lebih cepat dan efektif. Di sisi lain, tren digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan membuka ruang lebih luas bagi SIPD untuk dikembangkan, terlebih jika infrastruktur teknologi terus diperkuat di masa mendatang. Selain membantu meningkatkan efisiensi, SIPD juga dapat menjadi alat strategis dalam memperkuat transparansi dan akuntabilitas publik. Melalui keterbukaan informasi yang lebih baik, pemerintah daerah dapat membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

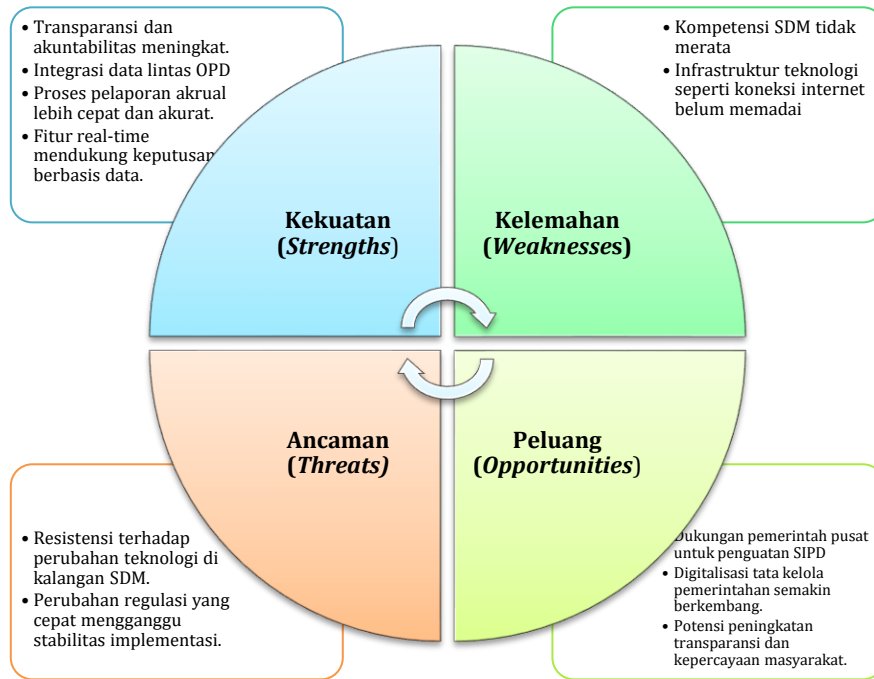
Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 12 Tahun 2019 Pasal 214 ayat (2), yang mewajibkan informasi keuangan daerah mencakup penganggaran, pelaksanaan anggaran, dan laporan keuangan. Hal ini membuka peluang besar untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Kabupaten Tojo Una-Una. Dengan SIPD, data keuangan lebih mudah diakses dan dipahami, yang meningkatkan kepercayaan masyarakat serta mempercepat pengambilan keputusan berbasis data yang akurat.

Analisis Ancaman (*Threats*)

Dalam upaya menerapkan SIPD secara efektif di Kabupaten Tojo Una-Una, terdapat beberapa ancaman yang perlu diantisipasi. Salah satu ancaman utama adalah resistensi terhadap perubahan teknologi di kalangan SDM. Sebagian besar staf OPD masih merasa lebih nyaman menggunakan metode manual dalam pengelolaan keuangan dan cenderung enggan untuk beralih ke sistem digital yang lebih modern. Sikap ini, jika tidak segera diatasi, berpotensi memperlambat proses adopsi SIPD, yang pada gilirannya dapat mengurangi efektivitas dan manfaat dari sistem tersebut dalam mendukung tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel. Selain itu, pemerintah daerah juga dihadapkan pada tantangan berupa perubahan regulasi yang cepat di tingkat nasional. Setiap kali terjadi pembaruan atau penyesuaian dalam modul SIPD maupun aturan penggunaannya, dibutuhkan waktu adaptasi bagi OPD untuk menyesuaikan diri. Proses penyesuaian ini terkadang mengganggu stabilitas dan efisiensi kerja yang sudah terbentuk. Ancaman-ancaman ini menyoroti perlunya strategi yang matang, seperti pelatihan SDM secara terus-menerus dan fleksibilitas dalam menghadapi perubahan kebijakan, agar penerapan SIPD dapat berjalan lancar dan mencapai tujuannya dalam penyusunan laporan keuangan yang berkualitas.

Menurut Tumija *et al* (2023) menyebutkan bahwa meski SIPD sudah diterapkan dalam pengelolaan keuangan daerah, fitur penting pada modul AKLAP, khususnya menu pelaporan, masih belum sepenuhnya dapat diakses. Kondisi ini menjadi ancaman bagi kelancaran penyusunan laporan keuangan, menghambat akurasi dan efektivitas SIPD dalam mendukung transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Jika tidak segera diatasi, keterbatasan akses ini dapat mengurangi potensi SIPD untuk memberikan manfaat optimal bagi daerah.

Adapun gambaran analisis SWOT untuk implementasi SIPD di Kabupaten Tojo Una-Una, disajikan melalui analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman sebagai berikut :



Gambar 2. Diagram Analisis SWOT

Berdasarkan gambar diatas dapat dijelaskan bahwa Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) di Kabupaten Tojo Una-Una telah memberikan dampak signifikan dalam peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Dengan kemampuan integrasi data lintas OPD dan fitur *real-time*, SIPD mendukung proses pelaporan berbasis akrual yang lebih cepat, akurat, dan andal. Namun, penerapan sistem ini masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kompetensi sumber daya manusia yang belum merata serta keterbatasan infrastruktur teknologi seperti koneksi internet yang kurang stabil. Di sisi lain, dukungan pemerintah pusat dan tren digitalisasi memberikan peluang besar untuk pengembangan SIPD, meskipun resistensi terhadap perubahan teknologi dan perubahan regulasi yang cepat tetap menjadi ancaman yang perlu diatasi. Dengan strategi yang tepat, SIPD dapat dioptimalkan untuk menciptakan tata kelola keuangan yang lebih transparan dan akuntabel.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan analisis SWOT terkait tantangan dan strategi dalam penyusunan laporan keuangan berkualitas dengan penerapan SIPD di Kabupaten Tojo Una-Una, dapat disimpulkan bahwa SIPD memiliki potensi besar dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Kekuatan utama SIPD adalah kemampuannya untuk menyediakan laporan keuangan yang relevan dan andal melalui proses pencatatan yang terintegrasi dan berbasis data, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih cepat dan akurat.

Namun, tantangan utama yang perlu diperhatikan adalah rendahnya kompetensi SDM dan keterbatasan infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh OPD, yang berpotensi menghambat penerapan SIPD secara optimal. Di sisi lain, terdapat peluang besar melalui dukungan regulasi pemerintah pusat serta tren digitalisasi yang semakin berkembang, yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki implementasi SIPD. Meskipun demikian, ancaman berupa

resistensi terhadap teknologi dan perubahan regulasi yang cepat juga perlu dikelola dengan baik agar tidak mengganggu keberlanjutan penerapan SIPD.

Untuk itu, disarankan agar pemerintah daerah memperkuat pelatihan SDM secara berkelanjutan, memperbaiki infrastruktur teknologi, dan memanfaatkan sepenuhnya dukungan dari pemerintah pusat. Selain itu, upaya sosialisasi yang intensif dan kesiapan adaptasi terhadap perubahan regulasi harus menjadi prioritas. Dengan langkah-langkah strategis ini, SIPD dapat diimplementasikan secara maksimal, mendukung pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien.

Keterbatasan penelitian ini mencakup fokus yang terbatas pada satu daerah, sehingga generalisasi hasil mungkin tidak dapat diterapkan di daerah lain. Selain itu, penelitian ini lebih menekankan pada aspek akuntansi dan pelaporan, sementara aspek lain dari SIPD belum sepenuhnya dieksplorasi. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dilakukan studi lebih komprehensif yang mencakup perbandingan antara beberapa daerah dalam penerapan SIPD..

F. DAFTAR PUSTAKA

- Ardianto, R., & Eforis, C. (2019). Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, pemanfaatan teknologi informasi, kompetensi sumber daya manusia, penerapan sistem pengendalian intern pemerintah, dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. *Jurnal Bina Akuntansi*, 6, 95–136.
- Arif, R. N., & Firmansyah, A. (2024). *Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah RI (SIPD RI) Dalam Proses Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Daerah Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Karanganyar* (Vol. 3, Issue 1).
- Binawati, S. E. E., Drs, J., & Affan, M. (2022). *AKUNTABILITAS DANA DESA*.
- Bodnar, G.H., dan W.S. Hopwood, 2004, *Accounting Information Systems*, 9th ed., New Jersey: Prentice-Hall Inc
- Defitri, S. Y. (2014). Eksplorasi kebutuhan stakeholders terhadap informasi dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah. *Media Ekonomi*, 22 (1).
- Hartono, Jogiyanto. 2005. *Sistem informasi strategik untuk keunggulan kompetitif*. Yogyakarta: Penerbit Andi Offset.
- Kotler, Philip, dan Gary Armstrong. 2008. *Prinsip-prinsip pemasaran jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi Sektor Publik edisi kedua*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta
- Miles, M. B. D. A. (1992). Michael Huberman. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru*, 2829-0747.
- Marpaung, Y. M. R. (2018). *Pengaruh Efektifitas Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pada PT PP (Persero) Tbk. Proyek Pelabuhan Sibolga*.
- Naida, N., Amir, A. M., Din, M., A, M. I., & Karim, F. (2023). The Effect of Implementing Local Government Information System on the Quality of Local Government Financial Reports Moderated by Human Resource Competence. *Journal of World Science*, 2(8), 1123–1129. <https://doi.org/10.58344/jws.v2i8.390>
- Nasution, M. I., & Si, N. M. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 9(2), 109-116.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

- , Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah.
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah.
- Romney, M. B., & Steinbart, P. J. (2018). *Accounting information systems*, 13th ed. Pearson Education Inc.
- Suyanto, Bagong, dan Sutinah. 2006. *Metode penelitian sosial*. Jakarta: PT Kencana Persada.
- Teken, I. K. A., & Romarina, A. (2023). *Efektivitas Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Sebagai Penunjang Kinerja Keuangan Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Denpasar Provinsi Bali*.
- Tumija, Hendra, A., & Sinurat, M. (2023). Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dalam Pengelolaan Keuangan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah. *Media Birokrasi*. <https://doi.org/10.33701/jmb.v5i1.3389>
- Turner, L., & Weickgenannt, A. (2009). *Accounting information systems second edition*. John Wiley & Sons, Inc
- Wurara, C. N. C., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi di BadanPerencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Manado). *Jurnal Eksekutif*, 2.
- Yuliani, Syafrida. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal telaah dan riset akuntansi* Vol 3 No 2 hal 206-220.